



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang : 2011 – 2012  
Masa Sidang : I  
Rapat : Ke- 3 (Tiga)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/Tanggal : Kamis, 8 September 2011  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 10.15 WIB s.d 18.10 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)  
Acara : Evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2011/1432 H  
Ketua Rapat : H. Muhidin M. Said, SE, MBA  
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih  
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Dirut PT. Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut PT ASDP, para Direksi Maskapai Penerbangan Nasional, dan Deputi Sarana dan Prasarana Kemeneg. Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.15 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Dirut PT. Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut PT ASDP, para Dirut Maskapai Penerbangan Nasional, dan Deputi Sarana dan Prasarana Kemeneg. Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS pada hari ini adalah untuk mendengarkan penjelasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2011/1432 H.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Darat, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinan dan penyesalan atas terjadinya peningkatan kasus kecelakaan selama periode angkutan lebaran tahun 2011/1432 H yang tercatat mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan program strategis yang dapat meningkatkan pelayanan angkutan lebaran kepada masyarakat dalam waktu tiga bulan ke depan.
2. Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah agar memiliki satu kesatuan data informasi transportasi termasuk didalamnya data terkait jumlah dan jenis kecelakaan. Untuk itu Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengembangkan Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk meningkatkan dan menambah alokasi anggaran guna peningkatan/percepatan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana perkeretaapian dalam mewujudkan angkutan massal yang murah, aman, nyaman dan selamat.
4. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk melakukan penegakan hukum kepada semua pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan transportasi termasuk menindak para operator/penyedia dan pengguna jasa transportasi yang melakukan pelanggaran.
5. Mencermati kondisi berbagai Jalan khususnya jalan Nasional yang merupakan jalur mudik lebaran, Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan serta prasarana pendukungnya sehingga dapat memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
6. Terkait maraknya kecelakaan pada beberapa ruas jalan tertentu maka Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan audit bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada ruas tersebut.
7. Memperhatikan bahwa  $\pm$  71% kecelakaan lalu lintas di Jalan raya menimpa kendaraan roda dua pada masa angkutan Lebaran 2011/1432 H, maka Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khusus terkait penggunaan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya.
8. Guna memberi pelayanan maksimal dan profesional bagi masyarakat pada masa mendatang, Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada para petugas lapangan yang bekerja pada hari hari libur Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Untuk dapat meningkatkan pengendalian dan pengawasan prioritas program angkutan massal, Komisi V DPR RI akan membentuk Panja Transportasi Nasional.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.10 WIB.

Jakarta, 8 September 2011

**KETUA RAPAT,**

TTD

**H. MUHIDIN M. SAID, SE, MBA**

**DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

TTD

**SUROYO ALIMOESO**

**DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

TTD

**LEON MUHAMAD**

**WAKIL KEPALA KORPS  
LALU LINTAS POLRI,**

TTD

**BRIGJEN POL. Drs. DIDIK PURNOMO, MSi**

**DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

TTD

**HERRY BAKTI**

**DEPUTI SARANA DAN PRASARANA  
KEMENEG. PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/BAPPENAS,**

TTD

**DR. Ir. DEDY SUPRIADI PRIATNA, MSc**

**DIRJEN BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,**

TTD

**Ir. DJOKO MURJANTO, MSc**

**DIRJEN PERKERETAAPIAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

TTD

**TUNDJUNG INDERAWAN**

